

RENCANA KERJA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT. atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo tahun 2022. Renja merupakan dokumen perencanaan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode satu tahun.

Rencana Kerja (RENJA) ini memuat target capaian RENJA tahun 2022, evaluasi pelaksanaan RENJA tahun 2022 dan capaian renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, *review* terhadap perencanaan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. Selain itu juga memuat tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Kami berharap Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Ponorogo tahun 2022 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Ponorogo.

Ponorogo,
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN PONOROGO

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Ponorogo Government. The text inside the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO" around the perimeter and "BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK" in the center. To the right of the stamp is a blue ink signature.

Drs. HERRY SUTRISNO
Pembina Utama Muda
NIP. 19660606 198603 1 016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	6
2.2 Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	6
2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	9
2.4 Review terhadap Perencanaan Awal RKPD	11
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	12
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	13
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	13
3.2. Tujuan dan Sasaran	13
3.3 Program dan Kegiatan	15
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	19
BAB V PENUTUP	20
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Aloon-Aloon Utara Nomor 6, Telepon (0352) 483 852,
Faksimile (0352) 483 852, Kode Pos (63413),

Website: [https:// bakesbangpol.ponorogo.go.id/](https://bakesbangpol.ponorogo.go.id/), Email: bakesbangpol_po@yahoo.com

P O N O R O G O

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 188.45/ /405.28/2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo, maka perlu menyusun Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 dengan menuangkannya dalam Keputusan Kepala Badan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2010 - 2025 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Ponorogo tentang Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2022 adalah Rencana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2022

Pasal 2

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2022 merupakan Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 3

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN YANG LALU.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
TC. 29
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
TC. 30
- 2.3 Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
TC. 31
- 2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan
TC. 33
- 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Pasal 4

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai Pedoman Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun 2022.

Pasal 5

Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal,

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KABUPATEN PONOROGO



Drs. HERRY SUTRISNO
Pembina Utama Muda
NIP. 19660606 198603 1 016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2022.

Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Ponorogo pada tahun 2022 menyusun Rencana Kerja yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan untuk memberikan landasan dan pedoman sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2022. Dokumen ini akan bermanfaat bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo dan lembaga terkait dalam rangka mewujudkan keterpaduan pelaksanaan maupun pembiayaan program untuk tahun 2022.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo melakukan penyusunan Renja SKPD tahun 2022 dengan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026 Kabupaten Ponorogo.

Digunakannya substansi sasaran dan formula indikator Renstra dan RPJMD Tahun 2021 - 2026 sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD tahun 2022 didasarkan oleh alasan sebagai berikut :

1. Penyusunan indikator dalam Rencana Kerja tahun 2022 masih berpedoman kepada Permendagri Nomor : 86 Tahun 2017 dan indikator SPM yang dikeluarkan oleh kementerian teknis masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo.

Dalam dokumen Renja SKPD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Setiap program dan kegiatan dalam Renja SKPD tahun 2022 yang menyajikan nilai pagu indikatif dan indikator capaian telah melalui proses verifikasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan dianalisis dengan strategi prioritas serta kemampuan kinerja daerah secara menyeluruh.

1.2. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah ;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No . 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 - 2025;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah ;

- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 ;

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022 adalah menyediakan arah acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan adalah agar terdapat sinerginitas dan kontinuitas dalam perencanaan program dan kegiatan di Kabupaten Ponorogo.

1.4. Sistematika penulisan.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang penyusunan Renja
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
TC. 30
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
TC. 31
- 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
TC. 32

BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
	3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.
BAB V	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2021 perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas program dan kegiatan berdampak kepada penapaian indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam Renstra dan telah diperjanjikan didalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Pengukuran dilakukan terhadap indikator program maupun kegiatan tahun berjalan, tahun sebelumnya serta proyeksi tahun yang akan datang secara keseluruhan kami tuangkan ke dalam tabel TC. 29.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis tersebut maka perlu dilakukan Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan di dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo, adapun hasilnya sebagaimana tertuang ke dalam tabel TC. 30.

Realisasi belanja APBD Tahun 2021 sebagaimana dilihat pada tabel berikut :

Berdasarkan hasil laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo, dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022, belanja SKPD dikelompokkan dalam belanja langsung dan tidak langsung dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut:

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai (Gaji dan TPP) tahun 2021 sebesar Rp. 1.495.847.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.490.101.207,00 (99 %).

B. Belanja Langsung Disetiap SKPD

No.	Program	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
	Belanja Langsung			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	a. Belanja Alat Tulis Kantor	62.627.400,00	58.178.500,00	92,8%
	b. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battaery kering)	6.453.300,00	6.453.300,00	100%
	c. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	2.397.500,00	99,8%
	d. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12.836.900,00	12.805.500,00	99,7%
	e. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	57.260.850,00	50.736.000,00	88,6%
	f. Belanja Jasa Kantor	19.223.975,00	17.372.667,00	90,3%
	g. Belanja Teleponr	1.090.875,00	854.386,00	78,3%
	h. Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	923.000,00	61,5%
	i. Belanja Kawat/ Faksimili / Internet	5.500.300,00	5.262.481,00	95,6%
	j. Belanja Paket / Pengiriman	0,00	0,00	0
	k. Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi dan Dekorrasi	2.400.000,00	1.600.000,00	66,6%
	l. Belanja Jasa Service Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	8.732.800,00	8.732.800,00	100 %
	m. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.709.650,00	27.039.150,00	97,5%
	n. Belanja Jasa Service	6.329.250,00	6.329.250,00	100 %
	o. Belanja Penggantian Suku Cadang	13.328.400,00	13.328.400,00	100 %

No.	Program	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
	p. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3.552.000,00	3.552.000,00	100 %
	q. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.500.000,00	3.829.500,00	85,1%
	r. Belanja Cetak dan Penggandaan	36.459.200,00	32.876.800,00	90,1%
	s. Belanja Cetak	28.732.800,00	26.207.000,00	91,2%
	t. Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0
	u. Belanja Foto Copy	4.226.400,00	3.169.800,00	75%
	v. Belanja Penjilidan	3.500.000,00	3.500.000,00	100%
	w. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.273.000,00	18.000.000,00	98,5%
	x. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	0,00	0
	y. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	18.273.000,00	18.000.000,00	98,5%
	z. Belanja Makanan dan Minuman	92.290.900,00	89.455.000,00	96,9%
	aa. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	51.195.000,00	49.775.000,00	97,2%
	bb. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.655.900,00	24.240.000,00	94,4%
	cc. Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	13.200.000,00	13.200.000,00	100%
	dd. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Lembur	2.240.000,00	2.240.000,00	100%
	ee. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0
	ff. Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0
	gg. Belanja Perjalanan Dinas	415.380.500,00	415.363.849,00	99,9%
	hh. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0	0	0
	ii. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64.380.500,00	64.363.849,00	99,9%
	jj. Belanja Transport Lokal PNS	321.000.000,00	321.000.000,00	100%
	kk. Belanja Transport Lokal Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	100%
	ll. Belanja Diklat, Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0,00	0,00	0
	mm. Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0
	nn. Belanja Jasa Pihak Ketiga	30.700.000,00	30.700.000,00	100%
	oo. Belanja Jasa Lainnya (penjaga portal, cleaning service, penjaga malam, satpam, sopir, dll)	30.700.000,00	30.700.000,00	100%
	pp. Belanja Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	100%
	qq. Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	5.400.000,00	100%
	rr. Belanja Honorarium Non PNS	109.600.000,00	109.600.000,00	100%
	ss. Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	14.500.000,00	14.500.000,00	100%
	tt. Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan Non PNS	95.100.000,00	95.100.000,00	100%

2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	a. Pengadaan Peralatan, perlengkapan gedung kantor dan rumah jabatan/rumah dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, sarana prasarana penunjang gedung kantor, rumah jabatan dan rumah dinas	16.000.000,00	14.826.500,00	98,84
	c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas atau Operasional	63.655.415,00	63.655.407,00	100,00
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur			
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu/Pakaian Tradisional/Pakaian Adat	21.000.000,00	17.375.000,00	82,74
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	0,00	0,00	0,00
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
	a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	b. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
	c. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	d. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	6.400.000,00	6.225.000,00	97,27
6.	Pengembangan Wawasan Kebangsaan.			
	a. Seminar, talkshow, diskusi peningkatan Wawasan Kebangsaan	59.650.000,00	56.058.000,00	93,98
7.	Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			
	a. Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	203.000.000,00	202.512.000,00	99,76
	b. Pelaksanaan Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	163.654.800,00	153.400.000,00	93,73
9.	Pendidikan politik masyarakat			
	a. Koordinasi forum-forum diskusi politik	40.000.000,00	39.870.000,00	99,68
	b. Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan demokrasi di daerah	200.000.000,00	192.800.000,00	96,40
	JUMLAH	1.233.704.800,00	1.199.328.078,00	97,21

2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis merupakan masalah yang saling berhubungan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan. Secara umum permasalahan yang masih dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain :

1. Konflik ekonomi sebagai akibat dari kemajuan teknologi ;
2. Konflik keagamaan yang disebabkan oleh dinamisasi aliran dalam kehidupan beragama dan aliran kepercayaan ;
3. Konflik antar etnis ;

a. Permasalahan.

❖ Terkait dengan sasaran strategis yang pertama yaitu Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi baik yang bersifat eksternal maupun internal sehingga keamanan dan ketenteraman di masyarakat akan tercapai.

Beberapa permasalahan yang muncul antara lain :

1. Adanya konflik keagamaan yang disebabkan oleh dinamisasi aliran dalam kehidupan beragama dan aliran kepercayaan ;
2. Konflik yang terjadi karena adanya gesekan antar perguruan silat dan bela diri yang ada di Kabupaten Ponorogo ;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya wawasan kebangsaan mengingat semakin kompleksnya persoalan yang ada dalam keberagaman masyarakat ;

❖ Sasaran Strategis kedua yaitu : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi baik yang bersifat eksternal maupun internal sehingga partisipasi masyarakat dalam politik akan meningkat.

Beberapa permasalahan yang muncul antara lain :

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang Peraturan Perundang-undangan dalam hal pendirian ORMAS dan LSM.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

b. Hambatan.

Hambatan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo ke depan dalam upaya meningkatkan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya antara lain :

1. Faktor geografis yang luas sehingga jangkauan dalam pengawasan kepada warga masyarakat terbatas ;
2. Kesadaran warga masyarakat dalam partisipasi politik masih rendah.

2.4 Review terhadap Perencanaan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawali program / kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW), Rancangan awal RKPD yang telah disusun oleh BAPPEDA Kabupaten Ponorogo telah mengakomodir semua program dan kegiatan yang menjadi rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.

Keselarasan Program dan Kegiatan nampak baik dalam jumlah maupun indikator yang terdapat dalam rancangan awal RKPD dibandingkan dengan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.

Penyusunan Renja SKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dalam dokumen rencana kerja memuat informasi rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo. Dokumen Rencana Kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.

Proses penyusunan RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 di dasarkan pada RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2022, agar di dalam pelaksanaan Program serta Kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Selanjutnya identifikasi atas rancangan awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan di konsolidasikan dengan KUA dan PPAS sebagai dasar penyusunan RKA SKPD sebagaimana tersebut dalam tabel T-C 31.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 45 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo maka untuk perencanaan program dan kegiatan tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas, utamanya terkait dengan terpeliharanya ketertiban, keamanan dan kenyamanan di masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional.

Usaha-usaha yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang hendak dicapai, diwujudkan dalam bentuk kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Selain itu keamanan dan ketentraman yang merupakan salah satu pendukung tercapainya pola pembangunan di suatu wilayah / daerah adalah menjadi prioritas utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo guna mendukung tercapainya keseluruhan program-program Bupati dan Wakil Bupati dalam periode 5 tahun.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagai unit pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dibutuhkan dan perlu ditetapkan strategi kebijakan program dan kegiatan. Strategi kebijakan yang ditetapkan adalah menjalin hubungan kerjasama dan komunikasi dengan Suprastruktur politik dan infrastruktur politik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik dan menjalin koordinasi dan komunikasi dengan Forkopimda dan Dinas terkait dalam upaya untuk deteksi dini dan cegah dini untuk menciptakan situasi yang kondusif, menjalin koordinasi dan komunikasi dengan Forkopimda dan Dinas terkait dalam upaya untuk deteksi dini dan cegah dini untuk menciptakan situasi yang kondusif.

Dalam rangka mewujudkan kebijakannya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tujuan, sasaran dan beberapa program yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan dimana pendanaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022.

a) Tujuan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi. Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo adalah :

“ Meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan situasi keamanan yang kondusif “

Dengan indikator : Prosentase kejadian terkait Poleksosbud yang dapat diegah.

b) Sasaran.

Adapun sasaran yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo adalah :

1. “ Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat “.

Indikator sasaran :

1. Prosentse masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan..
2. Frekuensi penuelenggaraan Forum Antar Umat Beragama.
3. Prosentase potensi konflik yang ditindaklanjuti 1 x 24 jam.

2. “ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik “

Indikator sasaran :

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam politik:
 - Pilpres
 - Pilgub
 - Pilbup
 - Pileg

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja tahun 2022 merupakan penjabaran atas Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : “ Meningkatkan rasa aman dan tenteram di masyarakat “.

Sasaran tersebut dicapai dengan 3 Program , 3 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dimaksud adalah :

- I. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
 1. Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan.
 - 1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi di bidang Ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan.
- II. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
 1. Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.
 - 1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukuan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
 - 1.2. Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- III. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.

- 1.1. Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah .
- 1.2. Sub kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran 2 : “ *Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik* “.

Sasaran tersebut dicapai dengan 2 Program, 2 Kegiatan dan 6 Sub kegiatan.

Adapun Program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah :

- I. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.
 1. Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik.
 - 1.1. Pelaksanaan Koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik.
 - 1.2. Sub kegiatan Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik.
- II. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
 1. Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

- 1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah.

Program-program penunjang yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo adalah :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
 - 1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 2.1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
 - 2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - 2.3. Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - 2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 3.1. Penyediaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor.
 - 4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 4.3. Penyediaan Peralatan rumah Tangga.
 - 4.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 4.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 4.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan.
 - 4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 5.1. Pengadaan Mebeleur.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 7.3. Pemeliharaan Mebeleur.
 - 7.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 7.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya.
 - 7.6. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor/Bangunan Lainnya.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022, maka disusun rencana kerja serta usulan pendanaan sebagaimana terlampir dalam Form :

Tabel TC. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik s/d Tahun 2022 Kabupaten Ponorogo

Nama Perangkat Daerah : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik s/d tahun berjalan					
					Target Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun (n-2)	Realisasi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Urusan Wajib Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat														
8	1	2		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Kebangsaan	75%	-	90%	100%	111,10%	10%	10%	100%	
8	1	2	01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100 Peserta	-	-	-	-	-	-	-	
8	1	2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	Terlaksananya Sosialisasi Penguatan dan Pemantapan Ideologi Pancasila	50 Peserta	-	-	-	-	-	-	
					Terlaksananya sosialisasi peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan	50 Peserta	-							
8	1	3		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan pengembangan etika serta Budaya Politik	Prosentase Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Politik	-	-	72%	72%	100%	-	-	-	
8	1	3	2.01	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, etika Budaya Politik, peningkatan Demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik.		-	-	-	-	-	-	-	-	
8	1	3	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemeliharaan Umum/ Pemeliharaan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Parpol yang Menerima Hibah Bantuan Keuangan Parpol	10 Parpol	10 Parpol	10 Parpol	10 Parpol	100%	10 Parpol	10 Parpol	100%

8	1	3	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemeliharaan Umum/ Pemeliharaan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Wilayah Kecamatan yang di Monitoring	21 Kecamatan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	100%	21 Kecamatan	21 Kecamatan	100%
8	1	4			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Ormas dan LSM yang Aktif	50%	20%	45%	21%	47%	45%	45%	100%
8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		100 Orang	-	-	-	-	-	-	-
8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi Undang-Undang KeOrmasan	100 Orang	-	-	-	-	-	-	-
8	1	5			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Frekuensi Penyelenggaraan Forum Antar Umat Beragama	4 Kali	-	4 Kali	4 Kali	100%	4 Kali	4 Kali	100%
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		-	-	-	-	-	-	-	-
8	1	5	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Fasilitas FKUB	1 Kali	-	1 Kali	1 Kali	100%	1 Kali	1 Kali	100%
8	1	5	2.02	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Koordinasi FKUB	3 kali	-	3 Kali	3 Kali	100%	3 Kali	3 Kali	100%
8	1	6			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Prosentase Potensi Konflik yang Ditindaklanjuti 1 x 24 Jam	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %
8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		-	-	-	-	-	-	-	-

8	1	6	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di Daerah	Jumlah Laporan Pemantauan Kepada Bupati di Bidang Pencegahan Konflik	70 Laporan	34 Laporan	80 Laporan	35 Laporan	158%	75 laporan	75 laporan	100%
8	1	6	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi Penyelenggaraan Rapat Forkopimda	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	100%	12 Kali	12 Kali	100%

Ponorogo,.....2022
Kepala Badan kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Ponorogo



Drs. HERRY SUTRISNO
Pembina Utama Muda
NIP 19660606 198603 1 016

Tabel TC 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Ponorogo

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (tnn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (tnn n)	Tahun 2023 (tnn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Angka Kriminalitas	-	-	290 Kasus	285 Kasus	280 Kasus	275 Kasus	290 Kasus	-	280 Kasus	275 Kasus	
2	Prosentase Potensi Konflik yang dapat diredam	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Tingkat Partisipasi Politik	-	-	72%	-	-	-	72%	-	-	-	

Tabel T-C .31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kabupaten Ponorogo

Nama Perangkat Daerah : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					
	BIDANG KESBANG					BIDANG KESBANG					
1	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kabupaten Ponorogo	Prosentase Masyarakat yang Paham Terhadap Ideologi Pancasila dan Kebangsaan	75%	-	1 PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kabupaten Ponorogo	Prosentase Masyarakat yang Paham Terhadap Ideologi Pancasila dan Kebangsaan	75%	-	
	1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kabupaten Ponorogo		100 Peserta	-	1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kabupaten Ponorogo		100 Peserta	-	
	1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Ponorogo	Terlaksananya Sosialisasi Penguatan dan Pemantapan Ideologi Pancasila	50 Peserta	-	1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Ponorogo	Terlaksananya Sosialisasi Penguatan dan Pemantapan Ideologi Pancasila	50 Peserta	-	
			Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan	50 Peserta	-			Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan	50 Peserta	-	
2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kabupaten Ponorogo	Frekuensi Penyelenggaraan Forum Antar Umat Beragama		25.000.000	2 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kabupaten Ponorogo	Frekuensi Penyelenggaraan Forum Antar Umat Beragama		25.000.000	
	1 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Kabupaten Ponorogo			25.000.000	1 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Kabupaten Ponorogo			25.000.000	
	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi , Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika , Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Fasilitas FKUB	1 Kali	25.000.000	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi , Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika , Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Fasilitas FKUB	25 Orang	25.000.000	
	2 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika , Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Koordinasi FKUB	3 Kali	-	2 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika , Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Koordinasi FKUB		-	

3	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Prosentase Potensi Konflik yang Ditindaklanjuti 1 x 24 Jam		1.320.000.000	3	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Prosentase Potensi Konflik yang Ditindaklanjuti 1 x 24 Jam		1.320.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan	Kabupaten Ponorogo			1.320.000.000		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan	Kabupaten Ponorogo			1.320.000.000	
	1 Pelaksanaan koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, kerja sama Intelejen, Pemantauan orang asing, Tenaga kerja asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitasi kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah (Tim Kewaspadaan Dini)	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Laporan Pemantauan Kepada Bupati di Bidang Pencegahan Konflik	12 Laporan	-		1 Pelaksanaan koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, kerja sama Intelejen, Pemantauan orang asing, Tenaga kerja asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitasi kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah (Tim Kewaspadaan Dini)	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Laporan Pemantauan Kepada Bupati di Bidang Pencegahan Konflik	35 orang	-	
	2 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ponorogo	Kabupaten Ponorogo	Frekuensi Penyelenggaraan Rapat Forkopimda	12 Kali	1.320.000.000		2 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ponorogo	Kabupaten Ponorogo	Frekuensi Penyelenggaraan Rapat Forkopimda	15 orang	1.320.000.000	
	BIDANG SOSPOL						BIDANG SOSPOL					
4	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.	Kabupaten Ponorogo	Prosentase Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Politik		1.721.018.000	4	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.	Kabupaten Ponorogo	Prosentase Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Politik		1.721.018.000	
	1 Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, etika Budaya Politik, peningkatan Demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik.	Kabupaten Ponorogo			1.721.018.000		1 Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, etika Budaya Politik, peningkatan Demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik.	Kabupaten Ponorogo			1.721.018.000	
	1 Pelaksanaan koordinasi dibidang Pendidikan Politik, etika Budaya Politik, peningkatan Demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik.	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Parpol yang Menerima Hibah Bantuan Keuangan Parpol	10 Parpol	1.721.018.000		1 Pelaksanaan koordinasi dibidang Pendidikan Politik, etika Budaya Politik, peningkatan Demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik.	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Parpol yang Menerima Hibah Bantuan Keuangan Parpol	10 Parpol	1.721.018.000	
	2 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendidikan Politik, etika Budaya Politik, peningkatan Demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik.	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Wilayah Kecamatan yang Dimonitoring	21 Kecamatan	-		2 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendidikan Politik, etika Budaya Politik, peningkatan Demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik.	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Wilayah Kecamatan yang Dimonitoring	21 Kecamatan	-	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kabupaten Ponorogo	Prosentase Ormas dan LSM yang Aktif	50%	-	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kabupaten Ponorogo	Prosentase Ormas dan LSM yang Aktif	50%	-	

1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kabupaten Ponorogo			-	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kabupaten Ponorogo			-
	1 Pelaksanaan Kebijakan dibidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing didaerah (pembentukan tim)	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Peserta Sosialisasi Undang-Undang Ke-Ormasan	100 Orang	-		1 Pelaksanaan Kebijakan dibidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing didaerah (pembentukan tim)	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Peserta Sosialisasi Undang-Undang Ke-Ormasan	100 Orang	-
	SEKRETARIAT						SEKRETARIAT				
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kabupaten Ponorogo			2.894.693.675	6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kabupaten Ponorogo			2.894.693.675
	1 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Ponorogo			10.200.000		1 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Ponorogo			10.200.000
	1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kabupaten Ponorogo	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja SKPD	3 Dokumen	3.400.000		1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kabupaten Ponorogo	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja SKPD	3 Dokumen	3.400.000
	2 Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Kabupaten Ponorogo	Tersusunnya DPA SKPD	2 Dokumen	3.400.000		2 Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Kabupaten Ponorogo	Tersusunnya DPA SKPD	2 Dokumen	3.400.000
	3 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Ponorogo	Tersusunnya Laporan Kinerja	1 Dokumen	3.400.000		3 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Ponorogo	Tersusunnya Laporan Kinerja	1 Dokumen	3.400.000
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Ponorogo			2.457.300.263		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Ponorogo			2.457.300.263
	1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Ponorogo	Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan	12 Bulan	2.380.380.263		1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Ponorogo	Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan	12 Bulan	2.380.380.263
	2 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kabupaten Ponorogo	Jumlah honorarium pengelola keuangan	12 Bulan	70.120.000		2 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kabupaten Ponorogo	Jumlah honorarium pengelola keuangan	12 Bulan	70.120.000
	3 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kabupaten Ponorogo	Tersusunnya Laporan Akhir Tahun	1 Laporan	3.400.000		3 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kabupaten Ponorogo	Tersusunnya Laporan Akhir Tahun	1 Laporan	3.400.000
	4 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	Kabupaten Ponorogo	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan / triwulan/ semesteran	1 Laporan	3.400.000		4 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	Kabupaten Ponorogo	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan / triwulan/ semesteran	1 Laporan	3.400.000
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Ponorogo			43.200.000		3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Ponorogo			43.200.000
	1 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut yang dibeli	26 ASN	43.200.000		1 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut yang dibeli	26 ASN	43.200.000
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Ponorogo			251.333.200		4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Ponorogo			251.333.200
	1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Ponorogo	Jumlah pengadaan komponen listrik dan penerangan yang tersedia	12 Bulan	6.196.000		1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Ponorogo	Jumlah pengadaan komponen listrik dan penerangan yang tersedia	12 Bulan	6.196.000
	2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Ponorogo	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	10 Item	50.000.000		2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Ponorogo	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	10 Item	50.000.000
	3 Penyediaan peralatan rumah tangga	Kabupaten Ponorogo	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	1 Paket	19.886.700		3 Penyediaan peralatan rumah tangga	Kabupaten Ponorogo	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	1 Paket	19.886.700
	4 Penyediaan bahan logistik kantor	Kabupaten Ponorogo	Jumlah pengadaan bahan logistik di kantor	12 Bulan	110.368.000		4 Penyediaan bahan logistik kantor	Kabupaten Ponorogo	Jumlah pengadaan bahan logistik di kantor	12 Bulan	110.368.000

	5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah surat masuk / surat keluar yang dikelola	12 Bulan	9.882.500		5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah surat masuk / surat keluar yang dikelola	12 Bulan	9.882.500	
	6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah media massa, buku, peraturan perundangan yang dibeli dan jasa publikasi yang	12 Bulan	15.000.000		6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah media massa, buku, peraturan perundangan yang dibeli dan jasa publikasi yang	12 Bulan	15.000.000	
	7 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Kabupaten Ponorogo	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	40.000.000		7 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Kabupaten Ponorogo	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	40.000.000	
	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Ponorogo			-		5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Ponorogo			-	
	1 Pengadaan Mebeleur	Kabupaten Ponorogo	Jumlah mebeleur yang dibeli	11 Unit	-		1 Pengadaan Mebeleur	Kabupaten Ponorogo	Jumlah mebeleur yang dibeli	11 Unit	-	
	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Ponorogo			12.500.000		6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Ponorogo			12.500.000	
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Ponorogo	Jumlah surat masuk / surat keluar yang dikelola	12 Bulan	2.500.000		1 Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Ponorogo	Jumlah surat masuk / surat keluar yang dikelola	12 Bulan	2.500.000	
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Ponorogo	Jumlah laporan pembayaran listrik, air dan	12 Bulan	10.000.000		2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Ponorogo	Jumlah laporan pembayaran listrik, air dan	12 Bulan	10.000.000	
	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	Kabupaten Ponorogo			120.160.212		7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	Kabupaten Ponorogo			120.160.212	
	1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah mobil dinas jabatan kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	2 Unit	75.160.212		1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah mobil dinas jabatan kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	2 Unit	75.160.212	
	2 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajak kendaraan	15 Unit	5.000.000		2 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajak kendaraan	15 Unit	5.000.000	
	3 Pemeliharaan mebeleur	Kabupaten Ponorogo	Jumlah mebeleur yang terpelihara	-	-		3 Pemeliharaan mebeleur	Kabupaten Ponorogo	Jumlah mebeleur yang terpelihara	-	-	
	4 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kabupaten Ponorogo	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	12 Bulan	10.000.000		4 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kabupaten Ponorogo	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	12 Bulan	10.000.000	
	5 Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kabupaten Ponorogo	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang terpelihara	1 Unit	30.000.000		5 Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kabupaten Ponorogo	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang terpelihara	1 Unit	30.000.000	
	6 Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor / bangunan lainnya	Kabupaten Ponorogo	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	1 Unit	-		6 Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor / bangunan lainnya	Kabupaten Ponorogo	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	1 Unit	-	
					5.960.711.675						5.960.711.675	

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022
Kabupaten ponorogo

Nama Perangkat Daerah : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volum e	Catatan
1	2	3	4	5	6
BIDANG KESBANG					
1	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kabupaten Ponorogo	Prosentase Masyarakat yang Paham Terhadap Ideologi Pancasila dan Kebangsaan	75%	
	1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kabupaten Ponorogo		100 Peserta	
	1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Ponorogo	Terlaksananya Sosialisasi Penguatan dan Pemantapan Ideologi Pancasila	50 Peserta	
			Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan	50 Peserta	
2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kabupaten Ponorogo	Frekuensi Penyelenggaraan Forum Antar Umat Beragama		
	1 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Kabupaten Ponorogo			
	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi , Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Fasilitasi FKUB	1 Kali	
	2 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika , Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Koordinasi FKUB	3 Kali	
3	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Prosentase Potensi Konflik yang Ditindaklanjuti 1 x 24 Jam		
	1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kabupaten Ponorogo			
	1 Pelaksanaan koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, kerja sama Intelijen, Pemantauan orang asing, Tenaga kerja asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitasi kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah (Tim Kewaspadaan Dini)	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Laporan Pemantauan Kepada Bupati di Bidang Pencegahan Konflik	12 Laporan	
	2 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ponorogo	Kabupaten Ponorogo	Frekuensi Penyelenggaraan Rapat Forkopimda	12 Kali	
BIDANG SOSPOL					
4	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan pengembangan etika serta Budaya Politik.	Kabupaten Ponorogo	Prosentase Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Politik		
	1 Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, etika Budaya Politik, peningkatan Demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan , perwakilan dan partai Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik.	Kabupaten Ponorogo			
	1 Pelaksanaan koordinasi dibidang Pendidikan Politik, etika Budaya Politik, peningkatan Demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan , perwakilan dan partai Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik.	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Parpol yang Menerima Hibah Bantuan Keuangan Parpol	10 Parpol	
	2 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendidikan Politik, etika Budaya Politik, peningkatan Demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan , perwakilan dan partai Partai Politik,	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Wilayah Kecamatan yang Dimonitoring	21 Kecamatan	
5	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kabupaten Ponorogo	Prosentase Ormas dan LSM yang Aktif	50%	
	1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kabupaten Ponorogo			
	1 Pelaksanaan Kebijakan dibidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing didaerah (pembentukan tim)	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Peserta Sosialisasi Undang-Undang Ke-Ormasan	100 Orang	
SEKRETARIAT					
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kabupaten Ponorogo			
	1 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Ponorogo			
	1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kabupaten Ponorogo	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja SKPD	3 Dokumen	

	2	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Kabupaten Ponorogo	Tersusunnya DPA SKPD	2 Dokumen	
	3	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Ponorogo	Tersusunnya Laporan Kinerja	1 Dokumen	
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Ponorogo			
	1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Ponorogo	Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan	12 Bulan	
	2	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kabupaten Ponorogo	Jumlah honorarium pengelola keuangan	12 Bulan	
	3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kabupaten Ponorogo	Tersusunnya Laporan Akhir Tahun	1 Laporan	
	4	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	Kabupaten Ponorogo	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan / triwulan/	1 Laporan	
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Ponorogo			
	1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut yang dibeli	26 ASN	
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Ponorogo			
	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Ponorogo	Jumlah pengadaan komponen listrik dan	12 Bulan	
	2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Ponorogo	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang	10 Item	
	3	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kabupaten Ponorogo	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	1 Paket	
	4	Penyediaan bahan logistik kantor	Kabupaten Ponorogo	Jumlah pengadaan bahan logistik di kantor	12 Bulan	
	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah surat masuk / surat keluar yang dikelola	12 Bulan	
	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah media massa, buku, peraturan perundangan yang dibeli dan jasa publikasi yang	12 Bulan	
	7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Kabupaten Ponorogo	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Ponorogo			
	1	Pengadaan Mebeleur	Kabupaten Ponorogo	Jumlah mebeleur yang dibeli	11 Unit	
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Ponorogo			
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Ponorogo	Jumlah surat masuk / surat keluar yang dikelola	12 Bulan	
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Ponorogo	Jumlah laporan pembayaran listrik, air dan telepon	12 Bulan	
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	Kabupaten Ponorogo			
	1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah mobil dinas jabatan kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	2 Unit	
	2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajak kendaraan	15 Unit	
	3	Pemeliharaan mebeleur	Kabupaten Ponorogo	Jumlah mebeleur yang terpelihara	-	
	4	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kabupaten Ponorogo	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	12 Bulan	
	5	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kabupaten Ponorogo	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang terpelihara	1 Unit	
	6	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor / bangunan lainnya	Kabupaten Ponorogo	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	1 Unit	

Tabel TC-33
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022
 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
 Kabupaten ponorogo

Nama Perangkat Daerah : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					BIDANG KESATUAN BANGSA				1.345.000.000				1.345.000.000
8	01	02			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Kebangsaan	Kabupaten Ponorogo	75%	0				0
8	01	02	2	01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Kabupaten Ponorogo	100 Peserta	0	APBD Kab Ponorogo			0
8	01	02	2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Sosialisasi Penguatan dan Pemantapan Ideologi Pancasila	Kabupaten Ponorogo	50 Peserta	0	APBD Kab Ponorogo		0
						Terlaksananya sosialisasi peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan	Kabupaten Ponorogo	50 Peserta	0	APBD Kab Ponorogo			0
8	01	05			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Frekuensi Penyelenggaraan Forum Antar Umat Beragama	Kabupaten Ponorogo		25.000.000	APBD Kab Ponorogo			25.000.000
8	01	05	2	01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Kabupaten Ponorogo		25.000.000	APBD Kab Ponorogo			25.000.000
8	01	05	2	01	03	Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Fasilitas FKUB	Kabupaten Ponorogo	1 Kali	25.000.000	APBD Kab Ponorogo		25.000.000
8	01	05	2	01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Koordinasi FKUB	Kabupaten Ponorogo	3 Kali	0	APBD Kab Ponorogo		0
8	01	06			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Prosentase Potensi Konflik yang Ditindaklanjuti 1 x 24 Jam	Kabupaten Ponorogo		1320000000	APBD Kab Ponorogo			1.320.000.000
8	01	06	2	01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Kabupaten Ponorogo		1.320.000.000	APBD Kab Ponorogo			1.320.000.000
8	01	06	2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di Daerah	Jumlah Laporan Pemantauan Kepada Bupati di Bidang Pencegahan Konflik	Kabupaten Ponorogo	12 Laporan	0	APBD Kab Ponorogo		0

8	01	06	2	01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi Penyelenggaraan Rapat Forkopimda	Kabupaten Ponorogo	12 Kali	1.320.000.000	APBD Kab Ponorogo			1.320.000.000
						BIDANG SOSIAL DAN POLITIK				1.721.018.000	APBD Kab Ponorogo			1.721.018.000
8	01	03				Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Prosentase Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam politik	Kabupaten Ponorogo		1.721.018.000	APBD Kab Ponorogo			1.721.018.000
8	01	03	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemeliharaan Umum/ Pemeliharaan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Kabupaten Ponorogo		1.721.018.000	APBD Kab Ponorogo			1.721.018.000
8	01	03	2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemeliharaan Umum/ Pemeliharaan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Parpol yang Menerima Hibah Bantuan Keuangan Parpol	Kabupaten Ponorogo	10 Parpol	1.721.018.000	APBD Kab Ponorogo			1.721.018.000
8	01	03	2	01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemeliharaan Umum/ Pemeliharaan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Wilayah Kecamatan yang di Monitoring	Kabupaten Ponorogo	21 Kecamatan	0	APBD Kab Ponorogo			0
8	01	04				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Prosentase Ormas dan LSM yang Aktif	Kabupaten Ponorogo	50%	0	APBD Kab Ponorogo			0
8	01	04	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat		Kabupaten Ponorogo		0	APBD Kab Ponorogo			0
8	01	04	2	01	03	Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi Undang-Undang KeOrmasan	Kabupaten Ponorogo	100 Orang	0	APBD Kab Ponorogo			0
						SEKRETARIAT				2.894.693.675	APBD Kab Ponorogo			2.894.693.675
8	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Kabupaten Ponorogo		2.894.693.675	APBD Kab Ponorogo			2.894.693.675
8	01	01	2	01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Kabupaten Ponorogo		10.200.000	APBD Kab Ponorogo			10.200.000
8	01	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja SKPD	Kabupaten Ponorogo	3 Dokumen	3.400.000	APBD Kab Ponorogo			3.400.000
8	01	01	2	01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Tersusunnya DPA SKPD	Kabupaten Ponorogo	2 Dokumen	3.400.000	APBD Kab Ponorogo			3.400.000
8	01	01	2	01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Kinerja	Kabupaten Ponorogo	1 Dokumen	3.400.000	APBD Kab Ponorogo			3.400.000

8	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kabupaten Ponorogo		2.457.300.263	APBD Kab Ponorogo		2.457.300.263
8	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji yang dibayarkan	Kabupaten Ponorogo	12 Bulan	2.380.380.263	APBD Kab Ponorogo		2.380.380.263
8	01	01	2	02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah honorarium pengelola keuangan	Kabupaten Ponorogo	12 Bulan	70.120.000	APBD Kab Ponorogo		70.120.000
8	01	01	2	02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Akhir Tahun	Kabupaten Ponorogo	1 Laporan	3.400.000	APBD Kab Ponorogo		3.400.000
8	01	01	2	02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan/ semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran	Kabupaten Ponorogo	1 Laporan	3.400.000	APBD Kab Ponorogo		3.400.000
8	01	01	2	05		Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Kabupaten Ponorogo		43.200.000	APBD Kab Ponorogo		43.200.000
8	01	01	2	05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut yang dibeli	Kabupaten Ponorogo	26 ASN	43.200.000	APBD Kab Ponorogo		43.200.000
8	01	01	2	06		Administrasi umum perangkat daerah		Kabupaten Ponorogo		251.333.200	APBD Kab Ponorogo		251.333.200
8	01	01	2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Jumlah pengadaan komponen listrik dan penerangan yang tersedia	Kabupaten Ponorogo	12 Bulan	6.196.000	APBD Kab Ponorogo		6.196.000
8	01	01	2	06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kabupaten Ponorogo	10 Item	50.000.000	APBD Kab Ponorogo		50.000.000
8	01	01	2	06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga yang tersedia	Kabupaten Ponorogo	1 Paket	19.886.700	APBD Kab Ponorogo		19.886.700
8	01	01	2	06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengadaan bahan logistik di kantor	Kabupaten Ponorogo	12 Bulan	110.368.000	APBD Kab Ponorogo		110.368.000
8	01	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah surat masuk / keluar yang dikelola	Kabupaten Ponorogo	12 Bulan	9.882.500	APBD Kab Ponorogo		9.882.500
8	01	01	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah media massa, buku, peraturan perundangan yang dibeli dan jasa publikasi yang dibayarkan	Kabupaten Ponorogo	12 Bulan	15.000.000	APBD Kab Ponorogo		15.000.000
8	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		12 Bulan	40.000.000	APBD Kab Ponorogo		40.000.000
8	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kabupaten Ponorogo		0	APBD Kab Ponorogo		0
8	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibeli	Kabupaten Ponorogo	11 Unit	0	APBD Kab Ponorogo		0
8	01	01	2	08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pengadaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kabupaten Ponorogo		12.500.000	APBD Kab Ponorogo		12.500.000
8	01	01	2	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk / keluar yang dikelola	Kabupaten Ponorogo	12 Bulan	2.500.000	APBD Kab Ponorogo		2.500.000
8	01	01	2	08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan pembayaran listrik, air dan telepon	Kabupaten Ponorogo	12 Bulan	10.000.000	APBD Kab Ponorogo		10.000.000
8	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara			120.160.212	APBD Kab Ponorogo		120.160.212
8	01	01	2	09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah mobil dinas jabatan kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	Kabupaten Ponorogo	2 Unit	75.160.212	APBD Kab Ponorogo		75.160.212
8	01	01	2	09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajak kendaraan	Kabupaten Ponorogo	15 Unit	5.000.000	APBD Kab Ponorogo		5.000.000
8	01	01	2	09	05	Pemeliharaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang terpelihara	Kabupaten Ponorogo	-	0	APBD Kab Ponorogo		0
8	01	01	2	09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	Kabupaten Ponorogo	12 Bulan	10.000.000	APBD Kab Ponorogo		10.000.000

8	01	01	2	09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang terpelihara	Kabupaten Ponorogo	1 Unit	30.000.000	APBD Kab Ponorogo		30.000.000
8	01	01	2	09	11	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor / bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	Kabupaten Ponorogo	1 Unit	0	APBD Kab Ponorogo		0
										5.960.711.675			5.960.711.675

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja merupakan penjabaran Renstra SKPD yang memberikan gambaran tentang Program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diharapkan pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo lebih terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. Namun demikian proses pembangunan memerlukan peran serta seluruh masyarakat baik pemerintah, Legislatif maupun masyarakat itu sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kerjasama dari semua pihak sangat diperlukan demi suksesnya pembangunan yang menjadikan kehidupan menjadi lebih baik dimasa datang serta mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang aman tenteram dan kondusif.

Ponorogo,

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN PONOROGO**



Drs. HERRY SUTRISNO
Pembina Utama Muda
NIP. 19660606 198603 1 016